



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Gedung BPKP Pusat lantai 7, Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120  
Telepon/Faksimili (021) 85910031  
Email : [rokumasi@bpkp.go.id](mailto:rokumasi@bpkp.go.id)

Nomor : LKIN - 582/SU04/3/2021

30 Juni 2021

Hal : Laporan Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi  
sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Yth.

Kepala Biro Manajemen Kinerja Organisasi dan Tata Laksana  
di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dengan simpulan sebagai berikut:

### 1. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Kegiatan, Biro Hukum dan Komunikasi memiliki 3 sasaran kegiatan dilengkapi dengan 3 indikator kinerja kegiatan (IKK). Sampai dengan triwulan I tahun 2021 sebanyak 1 IKK (33,33%) ditargetkan pengukurannya pada triwulan 2 tahun 2021 dan sebanyak 2 IKK (66,66%) ditargetkan pengukurannya pada triwulan 4 tahun 2021.

Target, realisasi dan capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2021 selengkapnya sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1  
Capaian Kinerja Kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi  
s.d. Triwulan II Tahun 2021

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kinerja Kegiatan			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
1 Meningkatkan kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan	1 Nilai area penguatan peraturan perundangan pada Indeks RB	Skala 1-5	3,15	-	-
2 Meningkatkan Reputasi BPKP	1 Indeks Reputasi BPKP	Skala 1-100	72	-	-
3 Meningkatkan kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi	1 Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Skala 1-10	8,69	-	-

Capaian kinerja kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 diuraikan dan dianalisis lebih lanjut sebagai berikut:

### **Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan**

Sasaran Kegiatan “**Meningkatnya kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan**” diukur dari satu IKP yaitu “Nilai area penguatan peraturan perundangan pada Indeks RB” dengan target nilai tahun 2021 sebesar 3,15.

Pengukuran terhadap IKP ini masih mengacu pada penilaian peraturan perundang-undangan pada indeks RB Tahun 2019 yaitu 3,13. Hingga saat ini capaian terhadap IKP ini sedang menunggu proses penilaian pada indeks RB Tahun 2020.

### **Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Reputasi BPKP**

Indeks Reputasi BPKP adalah indeks yang digunakan oleh BPKP untuk mengukur pencapaian kinerja BPKP yang dibentuk oleh identitas, citra, dan keselarasan antara identitas BPKP dengan citra BPKP menurut para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Sasaran Kegiatan “**Meningkatnya Reputasi BPKP**” diukur dari satu IKP yaitu “Indeks Reputasi BPKP” dengan target nilai tahun 2021 sebesar 72 dalam skala nilai 1-100.

Berdasarkan hasil survei pada Tahun 2020, secara kolektif Indeks Reputasi BPKP menurut penilaian publik eksternal BPKP berada pada tingkatan “Neutral” dengan nilai 4,95 dari skala 7 atau dalam skala 0-100 setara dengan 71.

Pengukuran atas indeks ini akan dilakukan kembali pada Triwulan IV Tahun 2021 dengan melibatkan pihak internal dan eksternal.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan Biro Hukum dan Komunikasi dalam peningkatan nilai capaian indeks reputasi BPKP adalah dengan:

1. Penajaman strategi untuk mengkomunikasikan kinerja positif dan peran BPKP sebagai pengawas intern pemerintah untuk meningkatkan dukungan masyarakat dan media massa terhadap peran BPKP.
2. Melakukan konsultasi dan penyempurnaan kajian pengukuran reputasi BPKP dengan Puslitbangwas.

### Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi

Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi” diukur dari satu IKP yaitu “Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi” dengan target nilai tahun 2021 sebesar 8,69. Pengukuran atas indeks ini akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2020.

## 2. Output Kegiatan

Output Kegiatan sesuai dengan RKA tahun 2021 Biro Hukum dan Komunikasi sebanyak 3 indikator output kegiatan (IOK) dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2  
Output kegiatan tahun 2021  
Biro Hukum dan Komunikasi

Indikator Output Kegiatan (IOK) (RKA/DIPA)	Satuan	Output				
		Target 2021	Target s.d. Tw I th 2021	Realisasi s.d. TW I	Capaian (%)	
					Tahun 2021	s.d. Tw I
Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	15	7	7	46,67	100
Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	Laporan	30	19	19	63,33	100
Jumlah Layanan Hubungan masyarakat dan Informasi	Laporan	31	16	18	58,06	100

Dari tabel 2 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. IOK 1 “Jumlah Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan” diukur dengan menghitung jumlah kegiatan analisis penyusunan, pengelolaan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

Realisasi sebanyak 7 Kegiatan atau mencapai 100% dari target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja yaitu sejumlah 7 kegiatan yang terdiri dari :

- a) Penyusunan Himpunan Peraturan BPKP Tahun 2021
- b) Evaluasi Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan I
- c) Penyusunan Abstrak Peraturan Perundang-undangan
- d) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (legislative drafting) Produk Hukum BPKP I
- e) Evaluasi Pengelolaan Peraturan Produk Hukum I
- f) Penyusunan Analisis Pembahasan Perjanjian/Kontrak/MoU I
- g) Penyusunan Analisis dan Deskripsi Peraturan Perundang-Undangan I

2. IOK 2 “Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum” diukur dengan menghitung jumlah Laporan Penelaahan Hukum dan Penanganan Bantuan Hukum yang dihasilkan

Realisasi sebanyak 19 Kegiatan atau mencapai 100% dari target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja yaitu sejumlah 19 kegiatan yang terdiri dari :

- a) Pendapat Hukum atas Permasalahan di Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Barat.
- b) Pendapat Hukum terkait Penunjukan BPKP sebagai Tim Penilai dalam Komite Penilaian dan Notifikasi Pencantuman Produk Inovasi dalam Katalog Elektronik Sektoral Produk Inovasi.
- c) Pendapat atas Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur *Food Estate* Kalimantan Tengah dan Kawasan Industri Subang.
- d) Pendapat Hukum atas Pengelolaan Aset KKP dan Perum Perindo di 6 (enam) Pelabuhan Perikanan.
- e) Pendapat Hukum atas Permasalahan *Joint Venture Agreement* antara PT Krakatau Steel dan POSCO.
- f) Pendapat Hukum atas Hasil Reviu Tunggakan Kegiatan Pemeliharaan Helikopter yang Belum Terbayarkan pada BASARNAS.
- g) Penanganan Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 73/G/2018/PTUN.MKS pada tingkat Peninjauan Kembali.
- h) Penanganan Sengketa Permohonan Informasi Publik Nomor 005/I/KIP-PS/2019 pada tingkat Kasasi.
- i) Pendampingan atas Permohonan/Nota Keberatan dari Kuasa Hukum PT Riskaindo Jaya terkait audit bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

- j) Pendapat Hukum atas Kegiatan Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah (Satgas AKD) Provinsi Banten Tahun 2020 terkait *Current Issues* Kegiatan Satgas AKD Provinsi Banten.
- k) Pendapat Hukum terkait Akta Perdamaian.
- l) Kajian atas Pengembangan dan Implementasi *Good Government* (GGG) di Kementerian/Lembaga/Daerah.
- m) Pendapat Hukum atas Bunga Giro Tambahan Dana PMN PT BPUI.
- n) Pendapat Hukum atas Informasi Permohonan Pertukaran Tanah di Jalan Petra Karang Panjang Ambon dari Keluarga Souripet (Pemohon) kepada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku.
- o) Penanganan Perkara Gugatan Perdata Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang.
- p) Pemberian Konsultasi Hukum terkait Adanya Surat dari Kuasa Hukum Eks Kepala Pusfatekgan LAPAN (Tersangka Kasus Tipikor) yang Meminta Penjelasan terkait Hasil Reviu Kerjasama Swakelola LAPAN – BIG.
- q) Pendampingan Pemeriksaan Tim Audit BPKP Provinsi Maluku sebagai Saksi di Polda Maluku.
- r) Pendampingan Pemeriksaan Tim Audit BPKP di Pengadilan Tipikor dalam Perkara Dugaan Tipikor Pengadaan BCSS Bakamla.
- s) Pemberian Konsultasi Hukum atas Surat dari Lokataru yang Meminta Informasi untuk Digunakan dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

3. IOK 3 “Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi” diukur dari jumlah Laporan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang dihasilkan.

Realisasi sebanyak 16 Kegiatan atau mencapai 100% dari target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja yaitu sejumlah 16 kegiatan yang terdiri dari :

- a) Laporan Monitoring Media Sosial Bulan Januari 2021
- b) Laporan Monitoring Website Bulan Januari 2021
- c) Laporan Layanan Informasi Bulan Januari 2021
- d) Laporan Layanan Informasi Bulan Februari 2021
- e) Laporan Monitoring Media Sosial Bulan Februari 2021
- f) Laporan Monitoring Website Bulan Februari 2021
- g) Laporan Monitoring Daily News Bulan Januari 2021
- h) Laporan Monitoring Daily News Bulan Februari 2021
- i) Laporan Monitoring Website Media Sosial Bulan Maret 2021
- j) Laporan Monitoring Website Bulan Maret 2021

- k) Laporan Layanan Informasi Bulan Maret 2021
- l) Laporan Layanan Informasi Bulan April 2021
- m) Laporan Monitoring Media Sosial Bulan April 2021
- n) Laporan Monitoring Website Bulan April 2021
- o) Laporan Monitoring Daily News Bulan Maret 2021
- p) Laporan Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi Triwulan I

### 3. Penggunaan Dana dan Sumber Daya Manusia (SDM)

#### a. Penggunaan Dana

Penggunaan dana kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2021 disajikan pada Tabel 3

Tabel 3  
Penggunaan dana s.d. TW II tahun 2021

Indikator Output Kegiatan (IOK)	Dana (Rp)				
	Pagu 2021	Pagu s.d. Triwulan II th 2021	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)	
				Tahun 2021	s.d. Tw II
Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	Rp448.564.000	Rp106.331.600	Rp99.312.569	50,21%	50,21%
Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	Rp736.238.000	Rp139.885.220	Rp113.115.894	49,93%	49,93%
Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp939.078.000	Rp253.551.060	Rp238.200.833	49,70%	49,70%
<b>Jumlah</b>	Rp2.123.880.000	Rp499.767.880	Rp450.629.296	49,92%	49,92%

Penyerapan dana sampai dengan Triwulan II adalah Rp450.629.296 atau 90,16% dari rencana penyerapan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, hal ini disebabkan karena penerbitan SP2D yang masih sebagian.

#### b. Penggunaan SDM

Realisasi penggunaan SDM sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 4

Tabel 4  
Penggunaan SDM s.d. TW I Tahun 2021

Indikator Output Kegiatan (IOK)	OH				
	Target 2021	Target s.d. Triwulan I th 2021	Realisasi s.d. TW I	Capaian (%)	
				Tahun 2021	s.d. Tw I
Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	1.896	948	952	50,21%	50,21%
Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	2.259	1130	1128	49,93%	49,93%
Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2.495	1248	1240	49,70%	49,70%
<b>Jumlah</b>	6.650	3326	3320	49,92%	49,92%

#### 4. Kinerja Lainnya

Selain kinerja yang diuraikan di atas, di Triwulan II Tahun 2020 Biro Hukum dan Komunikasi juga memperoleh penghargaan sebagai salah satu bentuk pengakuan atas majalah Warta Pengawasan BPKP yaitu Penghargaan Kategori *E-Magazine* dalam Penghargaan *Public Relation Indonesian Award*.

Demikian laporan kinerja kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih

Kepala Biro,  
  
 Kepala Biro,  
 NIP. 1961124 199203 1 001